

Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Berbasis Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Sosial di Desa Sidomukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo

Agus Pariono, Andi Yusuf Katili, Sofyan Alhadar

Universitas Bina Taruna Gorontalo

guspri811@gmail.com, yusuf2801@gmail.com, alhadsof21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan sebagai sarana menuju kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis secara mendalam fenomena kebijakan pembangunan berbasis partisipasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat secara kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam tahap evaluasi dan pengawasan masih tergolong rendah, mengindikasikan bahwa mekanisme partisipatif belum berjalan secara menyeluruh; indikasi peningkatan kesadaran sosial terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan, meskipun belum semua kelompok masyarakat merasakan dampak yang sama secara merata; kurangnya kapasitas masyarakat dalam perencanaan teknis, partisipasi simbolik, keterbatasan akses terhadap informasi publik, serta belum optimalnya pelibatan kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan disabilitas; efektivitasnya sangat tergantung pada kualitas pelibatan masyarakat dan keberlanjutan mekanisme partisipasi yang inklusif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Kebijakan, Pembangunan, Partisipasi. Kesejahteraan, Sosial

ABSTRACT

This study aims to analyze development policies as a means to achieve community welfare. This study uses a qualitative approach with descriptive analytical methods. This approach was chosen because it is considered most appropriate for describing, understanding, and analyzing in-depth the phenomenon of participation-based development policies and their impact on community social welfare in a contextual manner. The results show that participation in the evaluation and monitoring stages is still relatively low, indicating that participatory mechanisms have not been implemented comprehensively; there is an indication of increased social awareness of the importance of education and health, although not all community groups feel the same impact equally; there is a lack of community capacity in technical planning, symbolic participation, limited access to public

information, and the suboptimal involvement of vulnerable groups such as women, the elderly, and the disabled; the effectiveness of which depends heavily on the quality of community involvement and the sustainability of inclusive, transparent, and accountable participation mechanisms.

Keywords: *Policy, Development, Participation, Welfare, Social*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya yang sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat guna mencapai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, pembangunan telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan sentralistik menuju pendekatan partisipatif. Pergeseran ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Pendekatan ini diyakini lebih mampu menjawab kebutuhan lokal dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat tidak hanya dipandang sebagai instrumen demokrasi, tetapi juga sebagai faktor kunci dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dalam teori pembangunan modern, keberhasilan suatu kebijakan tidak semata-mata diukur dari output fisik atau target kuantitatif, tetapi dari seberapa besar dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam aspek kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial sendiri mencakup dimensi yang luas, mulai dari aspek ekonomi (pendapatan, pekerjaan), sosial (pendidikan, kesehatan), hingga aspek psikologis (kepuasan, keterlibatan sosial).

Dalam praktiknya, pelibatan masyarakat dalam pembangunan di tingkat lokal diwadahi melalui berbagai instrumen kebijakan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta program-program pemberdayaan masyarakat. Di daerah-daerah tertentu, kebijakan ini telah diterapkan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, dan organisasi lokal. Namun, sejauh mana partisipasi tersebut efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat masih menjadi pertanyaan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Desa Sidomukti yang terletak di Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, merupakan salah satu wilayah yang menarik untuk diteliti dalam konteks kebijakan pembangunan berbasis partisipasi. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis dan sosial yang khas, serta dinamika masyarakat yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir,

pemerintah desa bersama elemen masyarakat telah melaksanakan berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, sanitasi), pemberdayaan ekonomi masyarakat (pelatihan kewirausahaan, bantuan modal UMKM), dan kegiatan sosial lainnya yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Namun demikian, keberhasilan kebijakan pembangunan tidak dapat hanya dinilai dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi dari sejauh mana program tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks Sidomukti, perlu dilihat apakah pendekatan partisipatif yang digunakan benar-benar menghasilkan perubahan signifikan dalam dimensi kesejahteraan sosial masyarakat, atau hanya sebatas formalitas pelibatan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai dampak kebijakan pembangunan berbasis partisipasi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Sidomukti. Kajian ini menjadi penting tidak hanya sebagai refleksi terhadap implementasi kebijakan pembangunan di tingkat lokal, tetapi juga sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.

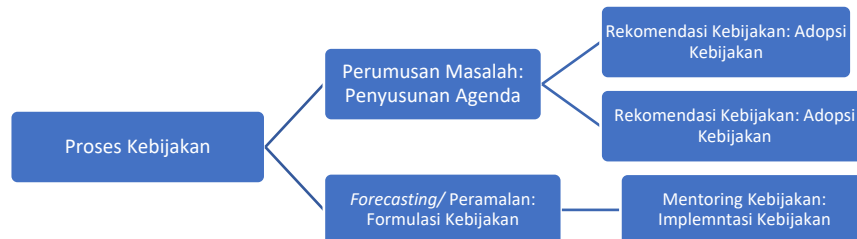
KAJIAN KONSEPTUAL DAN TEORI

Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan adalah serangkaian tindakan terencana yang disusun oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencapai kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh. Menurut (Winarno, 2014); (Wibawa, 2012), kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam konteks pembangunan, kebijakan ini diwujudkan melalui program, proyek, dan kegiatan yang dibiayai dan dikendalikan oleh negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, (Suwitri, 2008).

Kebijakan pembangunan adalah bagian dari kebijakan publik yang berorientasi pada perubahan sosial-ekonomi menuju kondisi yang lebih baik. Menurut Thomas R. Dye dalam (Handoyo, 2012), kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*” (apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dalam konteks pembangunan, kebijakan publik memuat keputusan yang bersifat strategis dalam mengatur sumber daya dan menentukan arah perubahan sosial ekonomi masyarakat.

Berikut adalah konsep kebijakan menurut Dunn



Tabel. 1 Proses Kebijakan Menurut Dunn, 1994

Secara teoritis, kebijakan pembangunan dibentuk oleh tiga unsur utama, yaitu aktor (pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya), proses (perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi), dan tujuan (peningkatan kualitas hidup masyarakat). Kebijakan pembangunan dapat bersifat top-down (pemerintah menentukan sepihak) atau bottom-up (berangkat dari aspirasi masyarakat). Dalam praktik modern, kecenderungan lebih diarahkan pada pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Pendekatan ini sejalan dengan teori pembangunan partisipatif yang diperkenalkan oleh Robert Chambers dalam (Zein, 2023), yang menekankan bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang berakar dari komunitas lokal, dan bukan sekadar hasil intervensi dari luar. Menurutnya, pembangunan harus memperhatikan konteks lokal, memanfaatkan pengetahuan lokal, dan memberikan ruang luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. (Murdiyanto, 2011) Cohen dan Uphoff dalam (Murdiyanto, 2011) membagi partisipasi ke dalam empat bentuk: partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan manfaat, dan evaluasi. Dalam pembangunan, partisipasi menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dalam konteks otonomi daerah, (Hakim, 2017).

Partisipasi masyarakat adalah konsep yang berakar dari teori demokrasi partisipatif dan pemberdayaan sosial. Dalam pembangunan, partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan. Menurut Cohen dan Uphoff dalam (Handoyo, 2012), partisipasi masyarakat terbagi dalam empat bentuk, yaitu:

- Partisipasi dalam pengambilan keputusan, di mana masyarakat dilibatkan dalam menetapkan prioritas program atau kegiatan.
- Partisipasi dalam pelaksanaan, yang mencakup keterlibatan tenaga, waktu, dan sumber daya masyarakat.
- Partisipasi dalam pemanfaatan manfaat, yaitu keterlibatan dalam menikmati hasil pembangunan secara adil.
- Partisipasi dalam evaluasi, yakni keterlibatan dalam menilai keberhasilan atau kekurangan program pembangunan.

Lebih lanjut, Paul dalam (Hakim, 2017) menyebutkan bahwa partisipasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan, memperkuat akuntabilitas, dan menumbuhkan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap hasil pembangunan. Partisipasi juga dapat memperkuat kohesi sosial dan memperbaiki komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam konteks lokal seperti di Desa Sidomukti, partisipasi masyarakat seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, kepemimpinan lokal, serta budaya musyawarah yang telah lama berkembang di masyarakat.

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial mengacu pada kondisi di mana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, baik dalam hal ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial. Menurut Midgley dalam (Fadilah, 2020), kesejahteraan sosial mencakup sistem intervensi sosial dan kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat kohesi sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir dari kebijakan pembangunan. Konsep ini memiliki cakupan yang luas dan multidimensi. Menurut Midgley dalam (Fadilah, 2020), kesejahteraan sosial adalah sistem intervensi sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, mengurangi ketimpangan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara kolektif. Kesejahteraan sosial mencakup dimensi ekonomi, sosial, kultural, dan psikologis.

Dalam perspektif pembangunan, kesejahteraan sosial tidak hanya diukur dari pendapatan per kapita, tetapi juga dari akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial, serta keterlibatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun indikator kesejahteraan sosial yang sering digunakan antara lain:

- **Indikator ekonomi**, seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, dan produktivitas.

- Indikator sosial, seperti angka melek huruf, status kesehatan, dan partisipasi dalam pendidikan.
- Indikator psikososial, seperti kepuasan hidup, keterhubungan sosial, dan rasa aman.

Dalam teori pembangunan manusia yang diperkenalkan oleh Amartya Sen (Fadilah, 2020), kesejahteraan dilihat sebagai perluasan *capabilities* atau kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Dengan kata lain, pembangunan harus memperluas pilihan dan peluang masyarakat, bukan hanya menambah kekayaan materi.

Ketiga konsep tersebut saling berhubungan dalam kerangka pembangunan berbasis partisipasi. Keterlibatan masyarakat yang optimal dalam kebijakan pembangunan diharapkan dapat menghasilkan output yang relevan dan berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Kondisi Sosial dan Pembangunan di Desa Sidomukti

Sidomukti merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang cukup baik, namun masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, serta lapangan kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah desa telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang melibatkan masyarakat, antara lain:

- Pembangunan jalan lingkungan dan drainase secara swakelola,
- Program pelatihan keterampilan usaha bagi pemuda dan ibu rumah tangga,
- Kegiatan gotong royong dan kerja bakti berkala,
- Penyaluran bantuan sosial berbasis musyawarah.

Pelaksanaan program-program ini sebagian besar dilakukan melalui pendekatan partisipatif, baik melalui forum Musrenbang, pertemuan warga, maupun diskusi kelompok. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam berbagai program tersebut memiliki tingkat keterlibatan yang bervariasi, tergantung pada jenis program dan pola kepemimpinan di tingkat lokal.

Data sementara menunjukkan bahwa terdapat peningkatan akses terhadap fasilitas umum dan ekonomi lokal, namun perlu dikaji lebih lanjut apakah perubahan ini telah membawa dampak terhadap indikator kesejahteraan sosial masyarakat, seperti pendapatan keluarga, kesehatan, pendidikan anak, serta keterlibatan sosial warga dalam kegiatan bersama.

Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat semakin meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan efektivitas kebijakan pembangunan di tingkat desa. Di

era otonomi daerah dan alokasi Dana Desa yang semakin besar, pendekatan partisipatif menjadi syarat utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Jika partisipasi hanya bersifat simbolik atau formal, maka pembangunan yang dihasilkan berpotensi tidak sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak memberikan dampak berarti terhadap kesejahteraan mereka.

Dengan mengkaji kasus di Desa Sidomukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, penelitian ini akan memberikan gambaran konkret tentang praktik pembangunan berbasis partisipasi di tingkat lokal dan relevansinya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan kebijakan pembangunan yang responsif, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis secara mendalam fenomena kebijakan pembangunan berbasis partisipasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat secara kontekstual. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap realitas sosial yang kompleks, dinamis, dan penuh makna melalui interaksi langsung dengan informan dan konteks lapangan.

Bogdan & Taylor (Dalam Azuwandri, 2022) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati sedangkan Metode deskriptif disini bertujuan untuk sifat atau karakteristik mengenai keputusan melalui pengukuran. Tujuan riset dari desain deskriptif bersifat suatu paparan untuk mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam riset, seperti: siapa, yang mana, kapan, dan di mana, studi dengan desain ini dapat dilakukan secara sederhana atau rumit.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini meliputi:

- Aparat Kelurahan, seperti Lurah dan Sekretaris Lurah;
- Tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, adat, dan pemuda;
- Anggota Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPKel) atau lembaga musyawarah lokal;
- Warga masyarakat yang aktif dalam kegiatan pembangunan;
- Penerima manfaat program pembangunan (misalnya pelaku UMKM, ibu rumah tangga, dan kelompok tani).

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, yakni:

- **Wawancara mendalam** (*in-depth interview*)

Digunakan untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan pandangan informan mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan dan partisipasi masyarakat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara sebagai panduan, namun tetap terbuka terhadap informasi yang berkembang.

- **Observasi partisipatif**

Peneliti hadir secara langsung di lokasi untuk mengamati kegiatan pembangunan, forum musyawarah, gotong royong, dan aktivitas sosial masyarakat lainnya. Observasi ini dilakukan untuk memahami perilaku sosial dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

- **Studi dokumentasi**

Peneliti menelaah dokumen perencanaan pembangunan, laporan realisasi anggaran, notulen musyawarah, profil kelurahan, dan dokumen pendukung lainnya. Dokumentasi ini berfungsi untuk menguatkan temuan lapangan dan memberikan data sekunder yang kredibel.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*) dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Reduksi Data**

Menyaring data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan rumusan masalah.

2. **Penyajian Data**

Data disusun secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks yang menggambarkan keterkaitan antar kategori seperti bentuk partisipasi, indikator kesejahteraan, dan faktor pendukung/penghambat.

3. **Penarikan Kesimpulan**

Menyimpulkan makna dari temuan lapangan dan mengkaitkannya dengan kerangka teori yang telah dibahas sebelumnya. Validasi dilakukan secara berkelanjutan melalui **triangulasi data**.

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, digunakan teknik **triangulasi**, yaitu:

- **Triangulasi sumber**, dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki latar belakang berbeda.
- **Triangulasi teknik**, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- **Triangulasi waktu**, dengan melakukan pengumpulan data dalam waktu berbeda untuk melihat konsistensi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan yang menggambarkan implementasi kebijakan pembangunan berbasis partisipasi serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Kelurahan Sidomukti. Temuan-temuan ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian diorganisasi ke dalam tiga aspek utama: (1) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, (2) dampak pembangunan terhadap kesejahteraan sosial, dan (3) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan partisipatif.

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Sidomukti menunjukkan keterlibatan aktif dalam beberapa tahapan pembangunan. Bentuk-bentuk partisipasi tersebut antara lain:

a. Partisipasi dalam Perencanaan

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan. Warga yang diwakili oleh tokoh masyarakat, ketua RT/RW, tokoh pemuda, dan perempuan ikut menyampaikan usulan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, seperti perbaikan jalan, pembangunan saluran air, dan pengadaan fasilitas sosial. Musrenbang dianggap sebagai sarana yang cukup representatif bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya.

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama pada proyek fisik skala kecil yang menggunakan metode padat karya. Contohnya, dalam pembangunan drainase lingkungan, warga menyumbangkan tenaga kerja secara gotong royong. Beberapa kelompok swadaya masyarakat juga dilibatkan dalam pelatihan keterampilan dan pengelolaan dana bantuan usaha.

c. Partisipasi dalam Pengawasan

Pengawasan dilakukan melalui keterlibatan warga dalam memantau pelaksanaan proyek, baik secara langsung maupun melalui forum informal. Namun, partisipasi dalam pengawasan dinilai belum optimal karena masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme anggaran dan pelaporan.

d. Partisipasi dalam Evaluasi

Evaluasi kegiatan pembangunan lebih banyak dilakukan oleh perangkat kelurahan, dengan keterlibatan masyarakat yang relatif minim. Forum evaluasi formal masih jarang dilakukan secara terbuka dan menyeluruh.

Hasil ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat menurut Cohen & Uphoff dalam (Wirawan et al., 2015), yang menyebutkan bahwa partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan lebih dominan, sementara pada tahap evaluasi dan pengawasan masih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi belum bersifat menyeluruh (holistik), melainkan masih bersifat segmental.

Dampak Kebijakan Pembangunan terhadap Kesejahteraan Sosial

Implementasi kebijakan pembangunan partisipatif di Sidomukti berdampak pada beberapa aspek kesejahteraan sosial masyarakat. Dampak ini dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

a. Peningkatan Akses Infrastruktur

Program pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan rehabilitasi sarana umum telah meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas warga dalam mobilitas sehari-hari. Jalan yang dulunya rusak dan becek kini lebih baik dan dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat. Hal ini turut mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

b. Peningkatan Pendapatan dan Kemandirian Ekonomi

Melalui pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha dari Dana Kelurahan, beberapa warga, khususnya ibu rumah tangga dan pemuda, mulai menjalankan usaha mikro seperti warung kelontong, produksi keripik, dan jasa sablon. Meskipun skala usahanya masih kecil, adanya kegiatan ekonomi ini memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan keluarga.

c. Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan

Pembangunan saluran drainase dan pengadaan tempat sampah kolektif membawa dampak positif terhadap kebersihan lingkungan. Beberapa warga melaporkan penurunan kasus penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan DBD. Partisipasi warga dalam kerja bakti juga meningkat, menunjukkan kesadaran kolektif terhadap kebersihan lingkungan.

d. Peningkatan Kohesi Sosial

Kegiatan pembangunan yang dilakukan secara gotong royong memperkuat interaksi sosial dan solidaritas antarwarga. Kegiatan kerja bakti dan musyawarah warga menciptakan ruang dialog dan memperkuat rasa kebersamaan. Warga merasa lebih dilibatkan dalam pembangunan dan memiliki rasa kepemilikan terhadap hasilnya.

e. Pendidikan dan Kesadaran Sosial

Meskipun tidak banyak program spesifik di bidang pendidikan, adanya bantuan alat tulis dan beasiswa dari dana kelurahan membantu meringankan beban keluarga kurang mampu. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga meningkat, ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi siswa dalam kegiatan belajar di luar sekolah.

Namun demikian, dampak terhadap kesejahteraan sosial belum dirasakan secara merata. Warga yang aktif dalam proses pembangunan cenderung lebih merasakan manfaat dibanding mereka yang pasif. Selain itu, beberapa kelompok seperti lansia dan disabilitas masih belum mendapat perhatian khusus dalam kebijakan pembangunan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Partisipatif

Faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi:

- Kepemimpinan lokal yang inklusif: Lurah Sidomukti menunjukkan komitmen terhadap keterlibatan warga dalam pembangunan.
- Adanya regulasi dan anggaran yang mendukung: Dana Kelurahan memberikan fleksibilitas dalam merancang program sesuai kebutuhan masyarakat.
- Budaya gotong royong yang masih kuat: Tradisi sosial seperti musyawarah dan kerja bakti memudahkan pelaksanaan program partisipatif.

Faktor penghambat antara lain:

- Kurangnya kapasitas masyarakat dalam perencanaan teknis: Banyak warga tidak memahami prosedur anggaran dan mekanisme perencanaan berbasis data.
- Partisipasi simbolik: Dalam beberapa kasus, kehadiran masyarakat di forum musyawarah hanya bersifat formal, tanpa keterlibatan substansial.
- Kurangnya transparansi informasi: Informasi terkait anggaran dan hasil evaluasi belum sepenuhnya terbuka kepada publik.
- Ketimpangan akses partisipasi: Kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum mendapat ruang partisipasi yang setara.

Analisis Temuan

Temuan di atas menunjukkan bahwa pembangunan berbasis partisipasi di Desa Sidomukti secara umum memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial, khususnya dalam aspek infrastruktur, ekonomi, dan interaksi sosial. Namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas partisipasi yang belum merata di seluruh tahapan pembangunan.

Bila merujuk pada pendekatan pembangunan partisipatif menurut Robert Chambers, proses yang ideal adalah pembangunan yang berangkat dari masyarakat,

dengan kontrol yang lebih besar berada di tangan warga. Dalam kasus Sidomukti, pendekatan ini mulai diterapkan namun masih cenderung dikendalikan oleh elite lokal dan aparaturnya kelurahan. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran dari pendekatan top-down ke semi-bottom-up.

Kesejahteraan sosial masyarakat yang menjadi tujuan utama pembangunan tampak meningkat, meskipun belum menyentuh semua dimensi secara menyeluruh. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi saja belum cukup untuk menjamin tercapainya kesejahteraan, tetapi kualitas partisipasi, dukungan institusional, dan pemerataan akses informasi menjadi faktor penentu keberhasilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pembangunan berbasis partisipasi di Kelurahan Sidomukti telah berjalan dalam beberapa tahap, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat terlihat aktif dalam forum Musrenbang dan kegiatan gotong royong, terutama dalam program-program infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Namun demikian, partisipasi dalam tahap evaluasi dan pengawasan masih tergolong rendah, mengindikasikan bahwa mekanisme partisipatif belum berjalan secara menyeluruh.
2. Kebijakan pembangunan yang mengadopsi pendekatan partisipatif berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Sidomukti. Dampak ini antara lain terlihat dari meningkatnya akses terhadap infrastruktur dasar, tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal skala kecil, membaiknya kondisi lingkungan, serta meningkatnya interaksi sosial dan rasa kebersamaan di kalangan warga. Selain itu, terdapat indikasi peningkatan kesadaran sosial terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan, meskipun belum semua kelompok masyarakat merasakan dampak yang sama secara merata.
3. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan berbasis partisipasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, seperti adanya kepemimpinan lokal yang terbuka, ketersediaan dana kelurahan yang fleksibel, dan budaya gotong royong yang masih hidup dalam masyarakat. Namun di sisi lain, terdapat pula faktor penghambat, yaitu kurangnya kapasitas masyarakat dalam perencanaan teknis, partisipasi simbolik, keterbatasan akses terhadap informasi publik, serta belum optimalnya pelibatan kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan disabilitas.
4. Secara keseluruhan, kebijakan pembangunan partisipatif di Sidomukti berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, namun

efektivitasnya sangat tergantung pada kualitas pelibatan masyarakat dan keberlanjutan mekanisme partisipasi yang inklusif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan berbasis partisipasi di tingkat kelurahan:

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal perencanaan dan pengawasan pembangunan.
Pemerintah kelurahan dan kecamatan perlu menyelenggarakan pelatihan atau sosialisasi secara berkala mengenai perencanaan pembangunan, penggunaan anggaran, dan mekanisme pelaporan agar warga memiliki pemahaman yang lebih baik dan dapat terlibat secara substansial, bukan hanya formalitas.
2. Memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas.
Informasi terkait rencana kerja kelurahan, anggaran, dan hasil evaluasi pembangunan perlu disosialisasikan secara terbuka melalui media informasi yang mudah diakses, seperti papan pengumuman publik, forum warga, dan media sosial resmi kelurahan. Ini akan mendorong partisipasi warga yang lebih informatif dan berbasis data.
3. Mengoptimalkan partisipasi kelompok rentan dan marginal.
Pelibatan perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan pemuda perlu diperkuat dalam setiap forum musyawarah dan kegiatan pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar inklusif dan merata.
4. Mengintegrasikan evaluasi partisipatif dalam setiap siklus pembangunan.
Pemerintah kelurahan perlu membangun budaya evaluasi yang melibatkan warga sebagai evaluator, misalnya melalui forum refleksi warga atau forum diskusi komunitas setelah program selesai dilaksanakan. Evaluasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan kualitatif.
5. Mendorong keberlanjutan dan inovasi program pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, bantuan UMKM, atau pengembangan produk lokal perlu didorong secara berkelanjutan dengan pendekatan berbasis potensi lokal. Pemerintah juga dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta atau lembaga sosial untuk memperkuat program.
6. Menjadikan Sidomukti sebagai model praktik pembangunan partisipatif tingkat lokal.
Dengan memperkuat kelembagaan, dokumentasi praktik baik (*best practices*), dan membangun jejaring antarwilayah, Kelurahan Sidomukti berpotensi menjadi percontohan pembangunan berbasis masyarakat yang efektif

dan kontekstual bagi wilayah lain di Kecamatan Mootilango maupun Kabupaten Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Azuwandri, A. (2022). Strategi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepahiang (Analisis SWOT). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 1167–1176.
- D. Indiahono. (n.d.). *Perbandingan Administarsi Publik: Model, Konsep, Dan Aplikasi* (Cetakan. 1). Penerbit Gava Media.
- Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 51. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 45–49. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/963>
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik Deliberatif*.
- Hardiman F. B. (2021). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Penerbit Kanisius.
- Murdiyanto, E. (2011). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem, Sleman. *Jurnal Sepa*, 7(2), 91–101.
- Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang*.
- Wibawa, S. (2012). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik Deliberatif*.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Wirawan, R., Mardiyono, & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(418), 11.
- Zein, H. M. (2023). *Teori dan Kebijakan Pembangunan (I)*. PT. Sada Kurnia Pustaka.